

Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru Di Indonesia

Noor Isnaeni

ABA BSI
Jl. Salemba Tengah No.45 Jakarta Pusat
nyus_naeni@ymail.co.id

ABSTRACT - *In the 19th century the Dutch East Indies government did not care about education for Chinese children. When the clothing, food and shelter were fulfilled, Chinese people began to think about their children's education. Finally, Chinese people made an association named THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) on March 17, 1900. The purpose of this scientific writing is to find out how the development of the educational of Chinese children in the 19th century until the collapse of new era and what the Chinese people doing for the education of their children at that time. The research method used is the method of historical research, that is: heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The main purpose of the establishment of schools THHK is to spread the religion of Confucius. By coming out Chinese schools established by the Chinese people, it caused that the Dutch East Indies government worried of the Chinese people and their offspring's nationalism growing up. Therefore, the Dutch East Indies government found Holandsch Chineesche School (HCS) – it was built up for Chinese people with Dutch language as the main language.*

Key Words: *development, education, childrens of chinese, in Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia mencatat bahwa sejak abad ke-5 sudah ada orang Tionghoa yang mengunjungi Nusantara. Salah satu orang Tionghoa yang mengunjungi Nusantara adalah Fa Xian. Nusantara pada saat itu masih dikuasai oleh raja-raja. Kemudian disusul oleh para perantau yang kebanyakan datang dari daerah Tiongkok Selatan. Para perantau itu sebagian besar menetap di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Karena jumlahnya kecil mereka membaur dengan masyarakat pribumi.

Semakin lama semakin banyak perantau dari Tiongkok Selatan bermigrasi ke Nusantara. Hal ini disebabkan karena di Tiongkok susah sekali mendapat mata pencaharian demi kelangsungan hidup mereka, sedangkan di Nusantara sendiri banyak lahan untuk mencari nafkah. Selain itu, perang dan bencana alam yang sering terjadi di daerah Tiongkok Selatan juga menjadi alasan para perantau Tiongkok bermigrasi ke Nusantara.

Para perantau tersebut kebanyakan adalah laki-laki, sehingga sering terjadi perkawinan di antara mereka dengan masyarakat pribumi. Kebanyakan profesi para imigran Tiongkok adalah berdagang. Hal itu terbukti dengan banyaknya para pedagang Tionghoa Peranakan yang berada di wilayah Jakarta sekarang.

Ketika bangsa Belanda yang tergabung dalam VOC mulai masuk ke Nusantara, mereka bermaksud menjajah wilayah ini. VOC

berusaha meningkatkan perdagangan antar pulau dan mulailah terjadi perdagangan besar-besaran di Nusantara. Potensi dagang orang Tionghoa sangat meresahkan pemerintah VOC yang pada saat itu mulai menjajah Nusantara. Jika orang-orang Tionghoa yang sangat berbakat dagang itu bersatu dengan masyarakat pribumi, maka kedudukan pemerintah kolonial VOC pasti terancam. Oleh karena itu pemerintah kolonial VOC melakukan politik adu domba untuk menghadapi masyarakat pribumi.

Ketika para pendatang dari Tiongkok sudah mulai mapan, yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan papan, maka mereka mulai memikirkan kebutuhan pendidikan untuk anak-anak mereka. Akan tetapi pada saat itu masih belum ada sekolah sehingga hanya orang-orang kaya saja yang menyekolahkan anak-anak mereka dengan memanggil guru privat untuk datang ke rumah mereka.

Alasan lain para pendatang Tiongkok memikirkan pendidikan untuk anak-anak mereka adalah karena pada saat awal abad 19 pemerintah Hindia Belanda tidak memikirkan atau mepedulikan pendidikan untuk masyarakat Tionghoa sendiri. Mereka lebih mepedulikan membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi dan untuk anak-anak Belanda sendiri. Adapun tujuan penelitian ini guna mengkaji perkembangan pendidikan yang diperoleh anak-anak Tionghoa pada masa abad

19 sampai berakhirnya orde baru di Indonesia dan apa yang dilakukan masyarakat Tionghoa untuk pendidikan anak-anak mereka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sekolah-sekolah Untuk Anak-Anak

Tionghoa Pada Zaman Hindia Belanda

Pada zaman Hindia Belanda ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, orang-orang Tionghoa mulai memperhatikan masalah pendidikan untuk anak-anak mereka. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu sama sekali tidak mepedulikan atau terfikir untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak masyarakat Tionghoa. Oleh karena itu, orang-orang Tionghoa mulai menangani sendiri masalah pendidikan anak-anak mereka.

Dalam buku 100 Tahun *Tiong Hoa Hwee Koan* (*Zhong Hua Hui Guan / 中华会管*) tertulis bahwa sebelum abad 20, masyarakat Tionghoa pernah mendirikan satu sekolah yang bernama *Beng Seng Su Yuan* (*Min Sheng Xue Yuan / 民生学院*), tapi tidak berhasil. Sebelum abad 20 anak-anak yang mendapatkan pendidikan hanya anak-anak dari keluarga kaya yaitu yang ayahnya menjabat sebagai perwira Tionghoa atau pengusaha besar yang mendapatkan pendidikan. Ketika belum ada sekolah, orang-orang yang mampu memanggil guru ke rumah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka.

Ong Hok Ham dalam bukunya yang berjudul *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* mengatakan bahwa “seorang hartawan akan mengontrak seorang guru untuk mengajar anak-anaknya dengan ongkos sekitar 600-1000 gulden setahun. Anak-anak yang lain bisa mendapatkan pelajaran asalkan dapat membayar dengan ketentuan yang berlaku. Pelajaran bisa diberikan di rumah sang guru atau di rumah salah satu dari murid-murid tersebut” (Ong, 2009: 71).

Biasanya guru-guru tersebut hanya mengajarkan cara-cara membaca dan menghafal karya-karya klasik Tionghoa (pada umumnya ajaran *Kong Huchu / 孔夫子*) akan tetapi murid-murid sekolah itu tidak mengerti makna yang terkandung di dalam karya-karya tersebut. Selain bentuk pengajaran privat seperti itu, ada juga guru yang membuka sekolah sendiri dengan memakai sistem kontrak, yaitu kontrak antara orangtua murid dengan sang guru selama satu tahun. Jika satu tahun sudah lewat, para orang tua murid bisa mempertahankan guru tersebut dengan cara memperpanjang kontrak. Tetapi jika para orang tua murid merasa kurang puas atas penyampaian materi yang diberikan untuk

anak-anak, mereka bisa membuat kontrak dengan guru yang lainnya.

Ong Hok Ham juga menyatakan bahwa di Batavia pada abad 19 para hartawan pernah mendirikan sekolah Tionghoa untuk anak-anak yang kurang mampu. Sekolah tersebut bernama *Gie Oh* (*Yu Xue / 育学*) yaitu “sekolah gratis”. Sekolah *Gie Oh* ini terletak di belakang Klenteng *Kim Tek Ie* (*Jin de Yuan / 金德院*) di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini digaji sebesar 1000 gulden setahun. Dana tersebut diambil dari “dana penguburan Tanjung” (Salah satu tanah pemakaman milik Kong Koan yang lokasinya di sekitar wilayah Slipi Jaya, Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat). Sekolah ini hanya mempunyai enam puluh murid dan dua orang tenaga pengajar saja.

Sekolah *Gie Oh* terkenal dengan nama sekolah Hokkian, karena bahasa pengantar di sekolah tersebut menggunakan bahasa Hokkian. Sistem mengajar di sekolah ini juga hanya menggunakan ajaran Konghuchu sebagai buku acuan mereka. Murid-muridnya hanya disuruh menghafal kitab klasik *Si So* (*Si Shu / 四书*) dan *Go Keng* (*Wu Jing / 五经*). Sekolah ini tidak mengajarkan ilmu sejarah, berhitung dan lain-lain. Karena hanya diharuskan membaca dan menghafal kitab klasik tersebut saja dan tidak mengerti maknanya, maka puncak kepintaran tertinggi yang bisa dicapai adalah membaca buku-buku bahasa klasik.

Menurut Kwee Tek Hoay, murid-murid sekolah lulusan itu tidak bisa menulis dan berbicara di dalam bahasa Belanda yang sederhana. Oleh karena itu ketika sekolah-sekolah Belanda didirikan, anak-anak lulusan sekolah *Gie Oh* tidak dapat pindah atau meneruskan ke sekolah Belanda tersebut, kecuali bagi anak-anak Tionghoa golongan tertentu. Anak-anak tertentu inipun baru boleh masuk ketika beberapa orang missionaris Belanda, seperti C. Albers, S.Coolsma dan D.J. Van Der Linden mendirikan sekolah swasta yang tidak hanya untuk anak-anak Belanda saja.

Sekolah Belanda yang pertama didirikan pada tahun 1816. Anak-anak Tionghoa tertentu yang diperbolehkan bersekolah di sekolah Belanda adalah anak-anak perwira Tionghoa atau yang orang tuanya kaya raya. Dengan alasan yang bermacam-macam pemerintah Belanda mempersulit anak-anak Tionghoa dan anak-anak pribumi untuk masuk sekolah ini. Pemerintah Belanda memberikan syarat seperti: 1) anak-anak sudah harus menguasai bahasa Belanda di rumah; 2) biaya sekolah yang mahal sekali; 3) harus ada rekomendasi

dari pejabat Belanda, seperti Residen atau asisten Residen. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka mereka tidak bisa diterima. Oleh karena itu, banyak keluarga Tionghoa yang kaya ataupun yang setengah kaya yang menitipkan anak-anak mereka di keluarga Belanda agar mereka terbiasa dan membiasakan berbahasa Belanda di rumah.

Jadi pada intinya, pemerintah Belanda sama sekali tidak mempedulikan pendidikan atau mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa dan anak-anak pribumi. Sudah berulang-ulang kali komunitas Tionghoa di Indonesia mengusulkan agar pemerintah Hindia Belanda memberi kesempatan bagi anak-anak Tionghoa bersekolah di sekolah Belanda tanpa syarat. Akan tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mempedulikannya.

2.2. Terbentuknya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK)

Pada pergantian abad 19 ke 20, di Tiongkok sedang terjadi pergolakan politik yang sangat hebat, yaitu upaya reformasi bahkan ada yang mengusulkan revolusi untuk menggulingkan Dinasti Qing dan mendirikan Republik Nasionalis Tiongkok. Dampak Nasionalisme Tiongkok terasa pula di Asia Tenggara termasuk di Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu Konghuchu-isme yang sedang dihidupkan kembali oleh beberapa pemimpin Tiongkok seperti *Kang Yu Wei* (*Kang You Wei* / 康有为) juga menjalar ke Hindia Belanda.

Menjelang akhir abad 19 itu juga sejumlah pemimpin Tionghoa Peranakan di Hindia Belanda membenci sikap diskriminasi Pemerintah Hindia Belanda terhadap orang-orang Tionghoa. Orang Tionghoa dibatasi ruang geraknya dan hanya dapat bepergian bila mempunyai *pas* (surat ijin bepergian) serta menghapus sistem *pacht* (suatu sistem yang memberi monopoli kepada orang Tionghoa sebagai pengumpul pajak) yang merupakan sumber penghasilan utama bagi orang Tionghoa. Oleh karena itu, para pemimpin tersebut memulai suatu gerakan pembaharuan untuk memperbaiki kondisi budaya maupun kondisi sosial mereka di Hindia Belanda.

Dalam buku 100 Tahun THHK disebutkan bahwa setelah mengadakan pembicaraan dan pertemuan-pertemuan antara orang Tionghoa Peranakan, akhirnya pada suatu hari mereka berkumpul di rumah Phoa Keng Hek yang terletak di Jalan Mangga Besar. Pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin Tionghoa Peranakan itu menghasilkan sebuah gagasan untuk

mendirikan sebuah perkumpulan. Akhirnya terbentuklah suatu Perkumpulan Tionghoa atau Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada tanggal 17 Maret 1900. THHK didirikan oleh 20 orang, yaitu Phoa Keng Hek, Khoe A Fan, Ang Sioe Tjiang, Kapitein Oey Giok Koen, Oey Koen Ie, Tan Kong Tiat, Lie Hin Liam, Nio Hoey Oen, Phoa Lip Tjay, Khouw Kim An, Tan Tian Seng, Ouw Tiau Soey, Ouw Sian Tjeng, Oen A Tjoeng, Lie Kim Hok, Khoe Siauw Eng, Tan Kim San, Khoe Hiong Pin, Khouw Lam Tjiang dan Tjoa Yoe Tek.

Maksud dan tujuan didirikannya THHK adalah: 1) memperbaharui adat istiadat Tionghoa sesuai dengan ajaran Nabi Khong Hoe Tjoe (Kong Fu Zi / 孔夫子) dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Peranakan Tionghoa; 2) pengadaan gedung bagi pertemuan anggota perkumpulan untuk membahas dan mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Tionghoa; 3) menyelenggarakan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota.

Pendirian THHK tersebut disahkan oleh Gubernur Jenderal Kolonial Belanda pada tanggal 3 Juni 1900 dengan surat keputusan No. 15 dan dimuat dalam "*Javasche Courant*" tanggal 8 Juni 1900 No. 46. Sejak saat itu THHK menjadi satu perkumpulan masyarakat Tionghoa yang mengurus masalah adat istiadat, memajukan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Tionghoa sesuai dengan ajaran Nabi Kong Hu Chu.

2.3. Terbentuknya Sekolah THHK

Tujuan utama didirikannya THHK adalah untuk menyebarluaskan ajaran Kong Hu Chu sebagai tujuan pokok resinsiasi (mentionghoakan kembali) orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Menurut para pendiri THHK, mendirikan sekolah adalah cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka. Cara ini juga merupakan protes terhadap pemerintah Hindia Belanda yang tidak mau mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa.

Sebenarnya larangan pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak Tionghoa masuk ke sekolah Belanda sudah dicabut pada tahun 1864, tapi hanya sedikit sekali anak-anak Tionghoa yang masuk ke sekolah Belanda. Sementara itu, pada tahun 1871 pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah untuk anak-anak pribumi, tapi tidak membuka sekolah untuk anak-anak keturunan Tionghoa. Oleh karena itu para pemimpin THHK mendirikan sekolah THHK untuk anak-anak keturunan Tionghoa.

Pada 17 Maret 1901, Tiong Hoa Hwee Koan mendirikan sekolah Tionghoa yang disebut Tiong Hoa Hak Tong (Zhonghua Xue Tang / 中华学堂). Kepala sekolah THHK yang pertama adalah Louw Koei Hong (Lu Guifang). Sekolah ini merupakan sekolah swasta modern pertama di Hindia Belanda saat itu. Pada perkembangan selanjutnya sekolah THHK yang ada di jalan Patekoan itu disingkat menjadi Pa Hua (Ba Hua / 巴华). Sekolah ini menggunakan sistem pendidikan modern yang telah diterapkan di Tiongkok dan Jepang. Berbeda dengan metode kuno yang hanya mempelajari karya-karya klasik Tiongkok dengan menyuruh siswa menghafal kitab klasik tanpa mengerti artinya.

Guru-guru THHK didatangkan langsung dari Tiongkok. Bahan pengajarannya diambil dari buku pelajaran sekolah untuk anak Tionghoa di Jepang dan berbahasa pengantar *Tjeng Im* (*Zheng Yin* / 正音), yang kemudian dikenal sebagai *Kuo Yu* (*Guo Yu* / 国语), sekarang juga dikenal dengan nama bahasa Mandarin. Dalam kurikulum sekolah THHK tercantum bahasa Mandarin, bahasa Inggris, berhitung, pengetahuan umum, musik dan olahraga sehingga Pa Hua dianggap sebagai perintis sekolah modern di Hindia Belanda. Meskipun demikian masih banyak orang tua yang belum mau menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah THHK.

Untuk membuktikan keunggulan murid-murid didikan Pa Hua, pada tahun 1902 para pemimpin THHK mengusulkan untuk mengadakan kemampuan berbahasa Tionghoa dengan murid-murid sekolah Gie Oh. Hasilnya kemampuan berbahasa Tionghoa dari sekolah Pa Hua lebih baik dari hasil pendidikan Gie Oh.

Dalam salah satu kurikulum THHK disebutkan bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah THHK dan sangat ditekankan di sekolah tersebut. Oleh karena itu sekolah THHK pada tanggal 1 September 1901 membuka sekolah berbahasa Inggris atau Yale Institute yang dipimpin oleh *Dr. Lee Teng Hwee*. Pada saat itu THHK mempunyai dua sekolah yaitu Sekolah Tionghoa dan Sekolah Inggris. Akan tetapi pada tanggal 8 Januari 1905 sekolah tersebut digabung menjadi satu. Sejak saat itu murid-murid sekolah THHK diberikan pelajaran bahasa Inggris.

Berdirinya sekolah THHK disambut antusias oleh orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Dalam waktu satu tahun, berdiri ratusan sekolah Tionghoa di berbagai daerah yang mengikuti manajemen THHK. THHK yang diprakarsai oleh pemuda-pemuda

Tionghoa di Hindia Belanda ternyata menjalar ke kota-kota lain, termasuk Semarang. THHK Semarang terbentuk pada tanggal 17 Januari 1904.

Dalam buku 100 Tahun *Tiong Hoa Hwee Koan* (*Zhong Hua Hui Guan* / 中华会管) tertulis bahwa sekolah THHK Semarang yang pertama menggunakan bangunan kecil terletak di Jl. Gang Tengah. Murid angkatan pertama hanya berjumlah 80 orang, akan tetapi dalam waktu yang singkat jumlah murid di THHK Semarang mencapai ratusan bahkan mencapai seribu anak. Berbeda dengan sistem pendidikan yang digunakan di sekolah THHK Batavia, THHK Semarang menggunakan sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh pendidikan di Amerika dan Jepang.

2.4. Berdirinya Sekolah Belanda-Tionghoa

Pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat di sekolah-sekolah THHK sangat menarik perhatian pemerintah Tiongkok, akan tetapi juga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda. Pejabat-pejabat Tiongkok dikirim ke Hindia Belanda untuk meninjau dan menyelia sekolah-sekolah Tionghoa yang berada di Hindia Belanda, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak Tionghoa untuk melanjutkan studinya di Tiongkok.

Perkembangan sekolah-sekolah THHK dan perhatian Pemerintah Tiongkok yang meningkat kepada masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda menimbulkan kekhawatiran di kalangan Pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa Belanda takut kehilangan kendali atas masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda dan khawatir jika lulusan sekolah THHK mempunyai pandangan politik yang berkiblat ke Tiongkok, bukan ke Hindia Belanda sebagai kawula Belanda.

Pada tahun 1907 Menteri Urusan Tanah Jajahan Belanda yang bernama D. Vock mulai mempertimbangkan untuk membuka sekolah-sekolah Belanda bagi anak-anak Tionghoa. Setahun kemudian, sekolah dasar Belanda pertama dibuka untuk anak-anak Tionghoa, yaitu *Holandsch Chineesche School (HCS)* didirikan di Batavia, kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya. HCS dirancang seperti *Europeesche Lagere School (ELS)* atau sekolah rendah Eropa/SD yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan tidak memberikan pelajaran bahasa Tionghoa ataupun kebudayaannya.

Pada tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa adalah kawula Belanda, berbeda dengan masyarakat pribumi yang statusnya lebih

rendah lagi dari orang Tionghoa. Beberapa tahun kemudian, Pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada anak-anak Tionghoa untuk masuk ELS, sekolah yang semestinya khusus untuk anak-anak Belanda dan Eropa. Karena alasan latar belakang budaya yang agak khas, maka kebanyakan orang Tionghoa Peranakan lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Belanda walaupun tes masuk yang diberikan oleh pihak sekolah sulit dan biaya sekolah yang lebih mahal. Akibatnya, anak-anak yang masuk sekolah THHK jumlahnya semakin berkurang. Meskipun berkurang, sekolah THHK tetap memiliki murid lebih banyak dari sekolah Belanda.

Menurut Leo Suryadinata, dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan minoritas Tionghoa di Indonesia* mengatakan bahwa menurut seorang pemimpin *Djawa Hak Boe Tjong Hwee* (*Zhaowa Xuewu Zonghui / 爪哇学务总会*) atau yang disebut Himpunan Umum Pendidikan Jawa, kebanyakan siswa Tionghoa Peranakan yang belajar di sekolah-sekolah THHK adalah mereka yang gagal masuk sekolah berbahasa Belanda.

Walaupun jumlah murid di sekolah-sekolah THHK lebih besar, tapi kurikulum di sekolah tersebut tidak cocok untuk kehidupan masyarakat Tionghoa dan sangat susah mencari pekerjaan di Hindia Belanda. Hal inilah yang membuat sekolah Belanda lebih menarik di mata para orang tua Tionghoa untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Belanda. Alasan lain adalah sekolah THHK baru sampai di tingkat SD saja (tahun 1913 pernah didirikan sebuah sekolah menengah, tapi setelah enam bulan ditutup karena kekurangan dana dan murid). Banyak yang menganggap bahwa para pemimpin THHK tidak tahu banyak mengenai masalah pendidikan. Oleh karena itu, para pemimpin THHK mencoba untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam sekolah mereka.

2.5. Perbaikan Sekolah-sekolah THHK

Para pemimpin THHK mencoba memperbaiki kekurangan dalam sistem pendidikan mereka melalui *Djawa Hak Boe Tjong Hwee*. Himpunan ini memiliki fungsi utama untuk mengawasi pengelolaan sekolah dan menyediakan guru-guru yang baik yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Himpunan ini memiliki sebuah departemen khusus untuk meninjau kembali kurikulum yang digunakan sekolah THHK. Departemen khusus ini didirikan menjelang tahun 1919 dan disebut *Kauw Yok Hwee* (*Jiaoyu Hui / 教育会*

atau Lembaga Pendidikan. Tahun 1919, Kauw Yok Hwee menyarankan supaya kurikulum sekolah THHK disesuaikan saja dengan keadaan masyarakat di Hindia Belanda, namun usaha perbaikan ini gagal karena kekurangan dana.

Merosotnya minat siswa untuk masuk sekolah di sekolah THHK menyebabkan Kwee Heng Tjiat dan The Kian Sing mengusulkan agar mengubah tipe sekolah THHK menjadi seperti HCS. Tahun 1925, kekecewaan Kwee memuncak dan mengusulkan gagasan lebih drastis lagi, yaitu menutup semua sekolah-sekolah THHK. Lebih parahnya lagi, surat-surat kabar Tionghoa peranakan ikut serta menyerang sekolah-sekolah THHK. Akhirnya dibentuklah suatu badan peneliti pendidikan orang-orang Tionghoa atau yang disebut *Tiong Hoa Kauw Yok Gian Kioe Hwee* (*Zhonghua Jiaoyu Yanjiuhui / 中华教育研究会*).

Badan ini menyelenggarakan konperensi untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah THHK. Hasil akhir dari konperensi ini adalah putusan untuk mendirikan sebuah percontohan. Akan tetapi, lagi-lagi upaya perbaikan ini gagal karena masalah biaya dan minat.

Kwee Tek Hoay mencoba menganalisis dan menyimpulkan alasan ke dalam beberapa kelompok mengenai kegagalan upaya itu, yaitu :

1. Orang Tionghoa Peranakan kaya dan menengah ingin tetap tinggal di Hindia Belanda tertarik pada pendidikan yang tinggi.
2. Orang Tionghoa Peranakan miskin ingin terus tinggal di Hindia Belanda puas walaupun anak-anaknya hanya bisa membaca dan menulis bahasa Melayu dengan huruf Latin.
3. Kaum nasionalis Tionghoa Peranakan ingin mengirimkan anak-anak mereka ke Tiongkok dan membantu negeri tersebut percaya bahwa pendidikan itu sangat penting walaupun mereka selamanya akan tinggal di Hindia Belanda.
4. Kaum nasionalis yang berpikiran praktis, yaitu Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok ingin mempertahankan identitas Tionghoanya, percaya bahwa bahasa Tionghoa tidak cukup untuk mendapat nafkah mereka dengan baik.
5. Orang Tionghoa Totok terutama orang Hakka dan Kongfu (Kanton) ingin kembali ke Tiongkok.

Kelompok-kelompok inilah yang menyebabkan upaya perbaikan itu gagal, karena mereka menginginkan tipe sekolah yang berbeda-beda untuk anak-anaknya.

Usaha kedua dilakukan kembali oleh The Kian Sing pada tahun 1927 di Surabaya. Dia mengusulkan supaya sekolah-sekolah THHK diubah menjadi semacam sekolah Belanda dan para lulusannya bisa melanjutkan pendidikan mereka ke negeri Belanda atau sekolah tinggi yang ada di Hindia Belanda. Kwee Tek Hoay menanggapi usulan itu dan memberikan pendapatnya kepada The Kian Sing bahwa usul itu bagus. Namun, kata Kwee Tek Hoay lebih lanjut, jika ingin memperbaharui sekolah-sekolah THHK jangan meminta persetujuan dari para pemimpin THHK, karena sebagian besar dari mereka adalah orang Tionghoa Totok dan berkilat ke Tiongkok.

Ternyata analisis Kwee benar. Sekolah-sekolah THHK di Hindia Belanda dan di Surabaya segera mengadakan pertemuan untuk menentang usul The Kian Sing ini. Menurut mereka jika kurikulum THHK diubah menjadi seperti sekolah Belanda, itu berarti perubahan total bagi mereka dan merupakan pemecatan guru-guru Tionghoa serta “Peranakanisasi” anak-anak Totok. Jadi, usul dari The Kian Sing benar-benar ditentang keras oleh para pemimpin THHK yang kebanyakan orang Tionghoa Totok.

Orang-orang Tionghoa peranakan banyak yang mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan sistem dan kurikulum sekolah Belanda dengan sembunyi-sembunyi. Contohnya, sebuah HCS “Nasional” (sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda dengan satu mata pelajaran tentang bahasa dan budaya Tionghoa) didirikan oleh sekelompok orang peranakan berpendidikan Belanda di Surabaya. Dr. Yap Hong Tjoen juga mendirikan sekolah swasta di Jogja serta orang Tionghoa Peranakan di Bogor juga mendirikan sekolah swasta serupa di Bogor.

Pada tahun 1927 pertemuan di Semarang yang kebanyakan dihadiri oleh orang Tionghoa Peranakan, mendesak Pemerintah Hindia Belanda agar lebih banyak lagi membuka sekolah-sekolah HCS dan menambahkan pelajaran bahasa dan budaya Tionghoa ke dalam kurikulum sekolah mereka. Usul itu diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka membuka lebih banyak lagi sekolah-sekolah HCS, akan tetapi tidak pernah mengubah kurikulum mereka. Hal ini disebabkan karena pemerintah takut jika bahasa dan budaya Tionghoa ditambahkan ke dalam pelajaran, maka rasa nasionalisme Tionghoa mereka akan muncul.

Sebuah survei menunjukkan bahwa anak Tionghoa yang mendapat pendidikan Belanda berjumlah sebanyak 27.802 murid, sedangkan yang mendapat pendidikan Tionghoa, yaitu

sekolah THHK dan sekolah-sekolah Tionghoa lainnya berjumlah 32.668 murid. Namun pertengahan tahun dua puluhan peran orang-orang Tionghoa Peranakan dalam pendidikan mulai turun karena orang Tionghoa Totok mendirikan sekolah sendiri untuk mereka. Mereka tidak puas dengan pendidikan dan pengajaran yang diberikan dari sekolah-sekolah THHK.

Di Bandung, ada tiga sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa Totok. Di Batavia sendiri, orang Hakka, Kongfu (Kanton) dan Hokkian juga mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak mereka berdasarkan kelompok linguistik masing-masing. Lambat laun orang-orang Tionghoa Totok mengambil alih kepemimpinan pendidikan Tionghoa di Hindia Belanda, sehingga sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang Tionghoa Peranakan jumlahnya turun dengan drastis.

Pada tahun 1932, berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh surat kabar *Kuomintang* (*Guomintang* / 国民党) terkemuka di Batavia dinyatakan bahwa banyak sekolah Tionghoa yang tidak memakai nama THHK atau memakai nama lain. Seperti contohnya Sekolah Kwong Djin (*Guang Ren* / 广人) yang dikelola oleh komunitas Kongfu (*Guangshao Huiguan* / 广韶会馆), lalu sekolah Gie Seng (*Yu Cheng* / 育成) dan Pin Min (*Ping Min* / 平民) yang disponsori oleh komunitas Hakka (*Huaqiao Shubao She* / 华侨书报社), serta sekolah Hokkian yang dikelola oleh Hokkian Hwee Koan (*Fujian Huiguan* / 福建会馆).

Meningkatnya sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa yang disponsori oleh orang Tionghoa Totok disebabkan karena penduduk Tionghoa Totok semakin lama semakin banyak serta disebabkan oleh kebijakan Guomintang. Pemerintah Guomintang mendirikan sebuah Biro Urusan Tionghoa Perantauan dan mengeluarkan kebijakan masalah pendidikan untuk mereka. Sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa diletakkan di bawah pengawasan para konsul pemerintah Guomintang atas nama pemerintah Tiongkok untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan itu dilakukan untuk kepentingan pemerintah Tiongkok.

Leo Suryadinata mengatakan bahwa Pemerintah Tiongkok melarang sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa di perantauan menerima hadiah dari pemerintah setempat, biaya keuangan harus datang dari masyarakat Tionghoa sendiri. Akan tetapi, banyak sekolah yang melanggar ketentuan ini pada tahun empat puluhan. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa Pemerintah Guomintang

tidak begitu efektif menjalankan kebijakannya. Pada umumnya, anak-anak Tionghoa Totok mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa, sedangkan anak-anak Tionghoa Peranakan mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa Belanda.

Selain mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa, anggota-anggota perkumpulan THHK juga terjun ke dalam organisasi politik. Contohnya adalah Chung Hwa Hui (Zhonghua Hui / 中华会)/CHH dan Partai Tionghoa Indonesia(PTI). Kedua organisasi politik ini mendirikan sekolah bagi anak-anak Tionghoa Peranakan, karena mereka menyadari bahwa pentingnya arti pendidikan bagi penerus mereka.

CHH mendirikan sekolah yang bernama *Volkschool* (sekolah rakyat) dan juga mendukung keuangan HCS. *Volkschool* melakukan kerjasama dengan HCS demi memudahkan murid-murid *Volkschool* untuk meneruskan sekolah di HCS. Sedangkan PTI mendirikan sekolah bernama sekolah PTI (sebelum tahun 1936 bernama sekolah Nan Yang). Sekolah yang didirikan PTI ini memberi contoh tentang persamaan ras.

2.6. Perguruan Tinggi Masyarakat Tionghoa

Tidak ada pendidikan lanjut bagi lulusan sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Anak-anak Tionghoa yang sudah lulus SD, jika ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi harus pergi ke Tiongkok. Tetapi jika cukup mahir berbahasa Inggris, mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke universitas-universitas di negeri Barat atau di Hong Kong.

Menjelang Perang Tiongkok-Jepang meletus pada tahun 1937, 300 mahasiswa Tionghoa Peranakan kembali ke Hindia Belanda. Kebanyakan mahasiswa Tionghoa Peranakan yang kembali ke Hindia Belanda bekerja di perusahaan swasta dan menjadi guru. Mereka adalah pendukung nasionalisme Tiongkok yang sangat gigih.

Berbeda dengan para lulusan sekolah Tionghoa berbahasa pengantar bahasa Belanda. Mereka ada yang melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda dan ada juga yang melanjutkan di Hindia Belanda sendiri. Pada tahun 1928 sudah ada empat puluh tiga mahasiswa yang masuk sekolah-sekolah tinggi Hindia Belanda. Pada tahun 1940, ada 741 mahasiswa Tionghoa Peranakan di universitas-universitas di Negeri Belanda. 107 orang menyelesaikan studinya dan memperoleh gelarnya. Setelah mendapatkan gelar, mereka

kembali ke Hindia Belanda, karena pada umumnya mereka berkiblat ke Hindia Belanda, bukan ke Tiongkok.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui deskripsi penelusuran sejarah, yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu: a) *heuristik*, adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. b) *kritik sumber*, sumber untuk penulisan ilmiah harus terlebih dahulu dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data. c) *interpretasi*, adalah penafsiran akan arti fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain, dan d) *historiografi*, adalah penulisan hasil penelitian atau merangkai fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Masa Pendudukan Militer Jepang

Selama masa pendudukan militer Jepang pada tahun 1942-1945, sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa asing (Belanda) dilarang. Hanya sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Tionghoa dan Indonesia saja yang tetap berjalan. Pemerintah militer Jepang memasukkan orang-orang Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan ke dalam satu wadah yang sama. Anak-anak Tionghoa Peranakan yang sebelumnya bersekolah di HCS atau ELS menerima pendidikannya di sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa, sehingga terjadi semacam resinsiasi anak-anak Tionghoa Peranakan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, masih ada sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda yang dibuka kembali di Jakarta dan di beberapa kota besar lain setelah Jepang menyerah kepada Indonesia. Banyak anak-anak Tionghoa Peranakan yang bersekolah di sekolah tersebut, tetapi jumlah siswa yang bersekolah di sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa di wilayah Federal juga lebih banyak daripada di wilayah Republik.

Di wilayah Republik Indonesia pada bulan Oktober 1947, muncul satu peraturan yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa bisa diberi subsidi, akan tetapi sekolah-sekolah itu harus mengajarkan bahasa Indonesia selama enam jam seminggu mulai dari kelas 3 Sekolah Dasar. Kementerian Pendidikan

Republik Indonesia juga memberikan sertifikat mengajar kepada guru-guru sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa, serta memperbolehkan bahasa Tionghoa diajarkan di sekolah pemerintah atau yang bersubsidi yang mayoritas siswanya adalah anak-anak Tionghoa. (Suryadinata 1988: 23).

Pada bulan Desember tahun 1949 Negara Indonesia terbagi atas dua wilayah, yaitu wilayah Federal (yang dikuasai Belanda) dan wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Belanda mendukung penuh pendirian sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Perubahan kebijakan pemerintah Belanda mengenai pendidikan anak-anak Tionghoa ini disebabkan karena Belanda berharap mendapatkan dukungan dari orang-orang Tionghoa bagi pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia.

Namun demikian, perjanjian Indonesia-Belanda telah memutuskan bahwa Belanda harus menyerahkan kedaulatan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Desember 1949. Sekolah-sekolah Belanda ditutup dan anak-anak Tionghoa Peranakan yang bersekolah di sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia atau kelompok-kelompok swasta lainnya.

Pada tahun 1950, ada sekitar 50.000 murid Tionghoa yang bersekolah di sekolah Indonesia. Namun demikian jumlah siswa di sekolah berbahasa Tionghoa masih berjumlah lebih besar. Sekitar 250.000 murid Tionghoa terdaftar di sekolah berbahasa pengantar Tionghoa, dan 150.000 murid di antaranya adalah Warga Negara Indonesia. Peningkatan yang mencolok ini disebabkan karena semua sekolah Belanda ditutup, sedang sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia tidak cukup. Pada tahun ini juga pemerintah Indonesia menghentikan subsidi kepada sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa, akan tetapi warga negara Indonesia yang masih keturunan Tionghoa masih diperbolehkan untuk bersekolah di sekolah-sekolah Tionghoa.

Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia mulai mengawasi sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Seluruh sekolah ini harus didaftarkan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Akan tetapi meskipun sudah terdaftar di dalam Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa tidak mendapatkan pengawasan dalam hal buku-buku pelajaran, guru ataupun

siswa. Pemerintah Indonesia menggolongkan sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa sebagai sekolah asing.

Pada bulan Maret 1954, berdiri sebuah organisasi sosial politik yang bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Baperki mempunyai tujuan melindungi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, mengambil alih pengelolaan sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia yang baru diubah. Sekolah-sekolah ini mempunyai kurikulum yang sama dengan sekolah yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia kecuali siswanya. Siswa-siswanya adalah anak-anak dari etnis Tionghoa dan bahasa Tionghoa boleh diajarkan sebagai mata pelajaran. Pada saat itu anak-anak Tionghoa belajar di tiga macam sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia yang berbeda-beda, yaitu sekolah yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, sekolah yang dikelola misionaris dan sekolah yang dikelola Baperki.

4.2. Sekolah-sekolah pro-Taiwan dan pro-Beijing

Pertentangan politik di Tiongkok, yaitu setelah Republik Rakyat Tiongkok di proklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, berdampak terhadap sekolah-sekolah Tionghoa yang berada di Indonesia. Sekolah-sekolah itu terpecah kiblatnya menjadi dua, yaitu yang pro-Beijing (RRT) dan yang pro-Taiwan (RNT). Para pemimpin pro-Taiwan ingin menjauhkan pengaruh Beijing dari sekolah-sekolah itu. Di sekolah yang pro-Taiwan, banyak guru yang pro-Beijing di pecat. Misalnya, sekolah *Qing Hua* (清华) di Bandung, telah memecat sebanyak 24 orang guru yang pro-Beijing (Suryadinata 1988: 26).

Perkembangan politik di dalam pemerintahan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh Beijing semakin besar. Sehingga makin lama makin banyak sekolah-sekolah yang jatuh ke tangan para pemimpin Tionghoa yang pro-Beijing. Banyak guru muda yang kelahiran Tiongkok aliran politiknya berkiblat ke Beijing. Pemerintah Indonesia dengan cepat mengakui bahwa RRT adalah penguasa tunggal di Tiongkok. Dengan kata lain pemerintah Indonesia mendukung kelompok pro-Beijing yang sedang berkembang itu.

Sekolah menengah terbesar yang pro-Beijing adalah Ba Zhong Zhongxue (巴中中学) dan Zhong Hua Zhongxue (中华中学). Sekolah Ba Zhong merupakan gabungan dari tiga sekolah yang pernah ada sebelumnya, yaitu sekolah Guangren, sekolah Fujian dan sekolah Huaqiao. Guru yang pada mulanya berjumlah

20 orang naik menjadi 100 orang pada tahun 1955. Begitu juga jumlah muridnya meningkat menjadi 3.300 pada tahun yang sama.

Sekolah THHK yang merupakan sekolah Tionghoa tertua di Jakarta, dapat tetap netral selama beberapa tahun. Sekolah ini mulai mengajarkan bahasa Tionghoa dan memperkenalkan bahasa Inggris makin banyak sehingga semua mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris. Sebagian besar, murid-muridnya adalah orang-orang Tionghoa Peranakan dan sebagian besar guru-gurunya adalah orang Tionghoa kelahiran Jawa, Singapura dan Malaysia. Akan tetapi menjelang akhir tahun lima puluhan sekolah-sekolah THHK jatuh ke tangan orang-orang yang pro-Beijing.

Guru-guru sekolah pro-Beijing biasanya lebih muda dan bangga menjadi orang Tionghoa yang pro Tiongkok Komunis. Sementara guru-guru yang pro-Taiwan lebih tua dan memihak Guomintang. Kebanyakan orang Tionghoa Totok yang bukan komunis mengirim anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah pro-Beijing, karena mereka mempunyai pikiran bahwa sekolah-sekolah ini memberi pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Sekolah-sekolah yang pro-Taiwan yang masih baru yang terbesar di antaranya adalah Zhongshan Zhongxue (中善中学) dan Yinni Gaoji Shangye Xuexiao (印尼高级商业学校) / Gaoshang (高上). Pada tahun 1956, Zhongshan memiliki 1.500 orang siswa dan 45 orang guru, sedangkan Gaoshang memiliki 950 orang siswa dan 20 orang guru (Suryadinata 1988: 27).

Pada tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia mulai menjalankan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Tionghoa bersamaan dengan timbulnya pemberontakan di daerah-daerah di Indonesia. Para pemberontak mendapat pasokan senjata yang berasal dari Taiwan, masuk ke Republik Indonesia melalui Singapura. Pemerintah Republik Indonesia memberikan reaksi dengan menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa yang pro-Taiwan diam-diam terlibat dalam pemberontakan itu. Akibatnya penguasa militer melarang semua sekolah berbahasa Tionghoa milik atau bahkan yang berempati kepada Taiwan.

Kedua jenis sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa ini berdiri bersama sejak tahun 1950-1957. Guru-guru dari sekolah yang pro-Taiwan kebanyakan berasal dari Tiongkok daratan yang sebagian kecil adalah kelahiran Hindia Belanda, tetapi mendapat pendidikan

dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di Tiongkok daratan.

Pada tanggal 6 November 1957, sebuah peraturan dikeluarkan oleh Djuanda yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dilarang masuk sekolah-sekolah asing (sekolah Tionghoa). Lagi pula, guru-guru di sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Tionghoa harus memperoleh izin baru dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

Seluruh buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa harus disetujui oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Peraturan itu ternyata membawa pengaruh besar ke dalam masyarakat Tionghoa yang mengakibatkan sejumlah sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa menurun drastis dan berfungsi sebagai pencegahan anak-anak Tionghoa Peranakan tertionghoakan kembali melalui sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa dan memisahkannya dari anak-anak Tionghoa Totok yang sebaya dengan mereka.

Pada bulan dan tahun yang sama, yaitu November 1957 ada 2.000 sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa di Indonesia dengan 425.000 orang siswa, 250.000 orang di antaranya adalah warga negara Indonesia. Pada waktu yang bersamaan juga ada 1.100 sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa yang diubah menjadi sekolah Nasional Indonesia (Suryadinata 1988: 30).

Banyak lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas sebelum tahun 1958 meneruskan sekolah ke Tiongkok, tetapi ada juga yang belajar ke Taiwan atau negeri Barat lainnya (pada umumnya Jerman). Para lulusan lainnya tinggal di Indonesia dan bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Sebagian besar yang meninggalkan Indonesia (mereka yang sekolah di Tiongkok) tidak kembali karena tidak mendapat izin masuk kembali dari pemerintah Republik Indonesia, sedangkan yang di Taiwan tidak bisa kembali karena secara resmi Republik Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Nasional di Taiwan.

Pada tahun 1958-1965 sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa boleh dikatakan banyak yang pro-Beijing. Demi mempertahankan budaya dan bahasa Tionghoa, maka banyak anak-anak Tionghoa yang bersekolah di sekolah yang pro-Taiwan dipindahkan ke sekolah yang pro-Beijing oleh orang tuanya. Guru-guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah tersebut harus lulus ujian

kemampuan berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kurikulum sekolah juga harus lebih banyak tentang Indonesia, seperti Sejarah dan Geografi. Kedua mata pelajaran ini dijadikan mata pelajaran wajib baik di Sekolah Dasar ataupun di Sekolah Menengah Pertama. Selama kurun waktu ini, sejumlah kecil lulusan sekolah menengah pertama di Republik Indonesia melanjutkan studi ke Taiwan, sejumlah lulusan yang lebih besar melanjutkan ke Republik Rakyat Tiongkok. Secara keseluruhan mereka yang melanjutkan ke luar negeri agak berkurang daripada periode 1950-1957. Ini disebabkan karena ada perubahan kebijakan dari RRT. Mereka lebih menganjurkan agar orang-orang Tionghoa Peranakan tetap tinggal dan bersekolah di perantauan saja.

Namun demikian, menurut informan Gondomono, anak-anak Tionghoa yang pergi ke RRT banyak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di Tiongkok. Banyak anak-anak Tionghoa yang sudah pergi ke Hongkong dan Macau kembali lagi ke Indonesia dengan cara ilegal. Beberapa lulusan dari sekolah menengah atau berbahasa pengantar bahasa Tionghoa ingin menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, tetapi kebanyakan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia tertutup untuk mereka.

Setelah sekolah-sekolah Tionghoa ditutup (Bandung, Jogja, Jakarta dan Surabaya), anak-anak Tionghoa masuk ke sekolah swasta katolik/Kristen yang dikelola oleh gereja. Contohnya adalah Pangudi Luhur, Penabur, Kanisius, Tarakanita, Theresia dan lain-lain. Satu-satunya kesempatan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi adalah di Universitas Res Publica (Ureca) yang didirikan oleh Baperki pada tahun 1960, Universitas Kristen Indonesia yang didirikan oleh Missionaris pada tahun 1953 dan Universitas Katolik Atmajaya yang didirikan oleh yayasan Katolik pada tahun 1960. Ketiga universitas ini menerima banyak siswa kelompok etnis Tionghoa yang lulus dari sekolah-sekolah Indonesia (Suryadinata 1988: 33).

Fakultas di universitas negeri yang paling susah menerima siswa kelompok etnis Tionghoa adalah fakultas kedokteran, kedokteran gigi, karena ada pembatasan 10% dari peraturan pemerintah saat itu.

4.3. Penutupan Sekolah-Sekolah Asing Pada Masa Orde Baru

Pada bulan Oktober 1965 terjadi pergolakan terbesar dalam sejarah Indonesia. Organisasi seperti Partai Komunis Indonesia

dan Baperki yang di anggap sayap kiri (pro komunis) dilarang karena dianggap terlibat menjadi simpatisan atau pro kepada apa yang disebut sebagai Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Gerakan ini dituduh ingin mengambil alih kekuasaan negara/kudeta (*coup d'etat*). Pemerintah Republik Indonesia juga menuduh bahwa RRT membantu atau mendukung gerakan yang dianggap didalangi oleh PKI. Karena terjadi pemberontakan ini, semua organisasi Tionghoa yang berkaitan dengan Beijing dinyatakan ilegal.

Pada tanggal 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan yang menutup semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Tahun berikutnya muncul Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Hal ini berdampak terhadap dilarangnya penggunaan aksara Tionghoa dalam bentuk penerbitan apapun, yang berlanjut dengan tindakan pemusnahan secara besar-besaran buku-buku berbahasa Mandarin. Puncaknya adalah penutupan lembaga-lembaga pendidikan Tionghoa.

Sekolah yang didirikan oleh Baperki seperti Ureca diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diganti namanya menjadi Universitas Trisakti. Mahasiswa pribumi banyak yang masuk Universitas Trisakti, sehingga perimbangan jumlah mahasiswa pribumi menjadi lebih banyak daripada mahasiswa Tionghoa Peranakan itu sendiri. Contoh lain adalah sebuah universitas swasta kecil di Jakarta, yaitu Universitas Tarumanegara yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas yang cukup besar dan menampung banyak mahasiswa Tionghoa. Begitu juga beberapa universitas swasta di Surabaya, salah satu contohnya adalah Universitas Kristen Petra yang menerima banyak mahasiswa Tionghoa (Suryadinata 1999: 236).

Anak-anak warga negara asing dianjurkan untuk masuk sekolah Indonesia swasta maupun negeri yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Akan tetapi, tempat di sekolah-sekolah Indonesia hanya diprioritaskan untuk anak-anak warga negara Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan banyak anak-anak Tionghoa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka. Pemerintah RI khawatir bahwa kalau anak-anak warga negara asing digunakan oleh orang-orang PKI, maka pada awal tahun 1968 pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Presiden No. B12/Pres.I/1968 yang memberikan ijin untuk membuka sekolah-sekolah yang disponsori oleh masyarakat

swasta orang-orang Tionghoa. Sekolah-sekolah ini dinamakan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPC) yang didirikan pada tahun 1969.

Sekolah-sekolah Sekolah Nasional Proyek Khusus ini mewajibkan agar :

1. Murid-muridnya merupakan gabungan dari anak-anak warga negara asing, WNI keturunan asing dan WNI asli,
2. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia,
3. Bahasa asing (Tionghoa) hanya berstatus sebagai salah satu mata pelajaran.

Sekolah Nasional Proyek Khusus yang didirikan pertama bernama *Datong Zhongxiao Xuexiao* (大同中校学校) atau yang dikenal juga dengan Sekolah Nasional Proyek Khusus Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua adalah *Chongde Xuexiao* (充德学校) atau Sekolah Nasional Proyek Khusus Jaya Sakti. Keduanya didirikan oleh orang-orang Tionghoa Totok yang pro-Taiwan di Jakarta. Sekolah ini berada di bawah pengawasan langsung dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak warga negara Indonesia maupun warga negara asing boleh bersekolah disini. Kurikulumnya sama seperti kurikulum Indonesia, hanya saja pada kurikulum tersebut boleh ditambahkan bahasa Mandarin.

Pada tahun 1970 ada delapan Sekolah Nasional Proyek Khusus di Indonesia. lima di Jakarta, dua di Palembang dan satu di Bandung. Menjelang akhir tahun 1973 ada 32 Sekolah Nasional Proyek Khusus di Sumatera Utara untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Akan tetapi, penguasa militer Sumatera saat itu melihat bahwa Sekolah Nasional Proyek Khusus tersebut hanyalah merupakan sekolah-sekolah RRT yang bergaya baru. Maksudnya adalah sebetulnya sekolah Sekolah Nasional Proyek Khusus umumnya diselenggarakan oleh kelompok yang pro-Taiwan, karena kelompok yang pro-RRT telah tersingkir. Akibatnya, para penguasa militer Sumatera menetapkan persyaratan baru untuk sekolah-sekolah Sekolah Nasional Proyek Khusus itu sendiri. Yaitu dengan mewajibkan komposisi murid-murid dari WNI keturunan asing sebanyak 50% dan WNI keturunan asli sebanyak 50 %.

Pada tahun pertama dan kedua sekolah pembauran ini dibuka, pihak yayasan berusaha keras untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Akan tetapi, dalam banyak hal ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh semua sekolah terutama mengenai komposisi murid-murid WNI asli dan WNI keturunan asing (Tionghoa). Tahun demi tahun, karena adanya beberapa faktor, jumlah murid-murid dari kelompok WNI asli semakin sedikit.

Contohnya adalah timbulnya rasa enggan belajar bersama dengan murid-murid WNI keturunan asing, letak sekolah pembauran yang sebagian besar ada di kalangan WNI keturunan asing dan sebagainya (Pelly 2003: 36).

Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan sekolah sebagai suatu wadah pembauran. Wadah itu sendiri dapat dianggap sebagai wadah pembauran dengan harapan agar kelompok anak-anak WNI keturunan asing dapat melebur ke dalam kelompok yang lebih dominan, yaitu kelompok anak-anak keturunan asli. Ada perbedaan kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap kelompok-kelompok etnik WNI asli dibanding dengan kebijakan terhadap WNI keturunan asing. Untuk WNI keturunan asing, pemerintah menekankan agar mereka membaur secara total ke dalam masyarakat nasional. Sekolah-sekolah pembauran dipandang oleh pemerintah sebagai wadah pembauran antara kelompok WNI asli dengan kelompok WNI keturunan asing, maka diharapkan generasi muda WNI keturunan asing dapat meleburkan diri ke dalam masyarakat dan budayanya ke dalam masyarakat nasional melalui wadah pendidikan itu.

Perkembangan-perkembangan Sekolah Nasional Proyek Khusus di Sumatera membuat khawatir pemerintah setempat, karena Sekolah Nasional Proyek Khusus tersebut menggunakan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar pengajaran yang merupakan pelanggaran peraturan pemerintah. Oleh karena itu Sekolah Nasional Proyek Khusus ini ditutup dan diambil alih oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah-sekolah tersebut kemudian diubah menjadi sekolah nasional swasta.

Jurusan Sinologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia juga merupakan salah satu contoh jurusan di perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada pembelajaran-pembelajaran atau studi tentang kebudayaan Tiongkok termasuk juga bahasanya. Jurusan Sinologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia berdiri sejak tahun 1940. Nasib dari jurusan ini lebih baik dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan Tionghoa yang ditutup. Perkuliahan di jurusan Sinologi tersebut di atas tetap bisa berjalan seperti biasanya. Hanya saja, pada tahun-tahun ajaran setelah terbitnya ketetapan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1966, jurusan ini tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru. Pendaftaran baru dibuka kembali pada tahun 1973 dengan jumlah siswa sebanyak 6 orang. (Kaboel dan Sulanti 2010: 209).

Pada pertengahan tahun 1993 Universitas Indonesia membuka kursus bahasa Mandarin untuk umum, dikelola oleh Lembaga Bahasa Internasional yang berada di bawah naungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Langkah inipun diikuti oleh Universitas Darma Persada di kampus barunya di Jalan Raden Inten, Jakarta Timur. Kedua universitas ini kemudian menjadi orangtua asuh bagi lembaga-lembaga pendidikan formal atau informal yang berminat menyelenggarakan kelas bahasa Mandarin. (Kaboel dan Sulanti 2010: 210).

Pemerintah Orde Baru pada saat itu mengeluarkan lebih dari seratus peraturan untuk membatasi ruang gerak warga keturunan Tionghoa di dalam bidang politik, ekonomi, agama, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Aksara, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, koran dan semua terbitan Tionghoa dinyatakan terlarang. Pemerintah Orde Baru telah berhasil mengindonesiakan orang-orang Tionghoa, sebagaimana terbukti dari tingkat kemampuan membaca dan menulis di antara generasi Tionghoa yang lebih muda. Karena bahasa Tionghoa dipelajari dan didapatkan secara terbatas oleh sebagian kecil di antara mereka.

Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru terjadi kerusuhan Mei tahun 1998 yang menyebabkan krisis ekonomi. Kerusuhan tersebut mengundang banyak protes dari mahasiswa yang mengakibatkan presiden Soeharto tidak mampu bertahan di dalam kepemimpinannya. Dengan kata lain presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatannya oleh para demonstran yang pada umumnya terdiri dari mahasiswa.

4.4. Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Setelah Berakhirnya Orde Baru

Setelah pemerintahan orde baru runtuh, maka pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Indonesia lebih bebas. Banyak SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang bagus, bahkan bisa sangat mahal dibuka untuk semua anak baik dari kelompok WNI asli ataupun dari WNI keturunan asing. Selama kurun waktu kurang lebih 32 tahun dari masa Orde Baru tidak ada buku-buku dalam bahasa Mandarin. Akan tetapi keadaan berubah setelah pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto runtuh pada tanggal 21 Mei 1998.

Setelah Presiden Soeharto lengser, penggantinya adalah Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999. Hasilnya memang terjadi perubahan dalam hal hak warga keturunan Tionghoa. Masa

kepemimpinan Presiden B.J. Habibie tidak berlangsung lama. Hanya berlangsung selama satu tahun. Setelah itu, Presiden B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999. Gus Dur pada tahun 2000 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Orang-orang Tionghoa diperbolehkan menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, termasuk mempelajari bahasa Mandarin beserta akasarnya. (Prasetyo 2010: 170).

Menurut informan Gondomono, melihat minat yang semakin besar untuk belajar bahasa Mandarin, maka pemerintah RRT mengirimkan berpuluh-puluh guru untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri atau swasta di perguruan tinggi. Guru-guru dari RRT itu juga membantu calon-calon guru atau dosen-dosen yang mengajar bahasa Mandarin. Bidang studi juga semakin banyak macamnya. Para lulusan SMA tidak hanya melanjutkan studi ke bidang manajemen, perbankan/admin, tetapi juga kedokteran. Bidang lainnya yaitu arsitektur, perhotelan, komunikasi bahkan bidang-bidang yang masuk humaniora (arkeologi, kesusastraan, bahasa, linguistik dan kesenian). Namun pada umumnya mereka yang sudah lulus SMA memilih jurusan yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Contohnya adalah jurusan bahasa Jepang atau bahasa Mandarin.

Kesempatan untuk mempelajari bahasa Mandarin yang lebih luas dan terbuka tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah tingkat SD sampai tingkat Universitas saja, akan tetapi tempat-tempat kursus bahasa Mandarin yang bermunculan juga mengajarkan bahasa Mandarin. Pengajaran bahasa mandarin tersebut tidak hanya untuk WNI keturunan Tionghoa saja, tetapi juga untuk WNI asli. Kursus-kursus ini ada yang diselenggarakan oleh lembaga kursus baru dan ada juga yang diselenggarakan oleh lembaga kursus yang lama yang sebelumnya telah menyelenggarakan program lain.

Sejumlah universitas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Darma Persada tidak hanya menerima mahasiswa yang ingin masuk Jurusan Bahasa atau Sastra Cina saja, tetapi juga menerima murid-murid yang ingin mengikuti kursus bahasa Mandarin di lingkungan kampus. Selain kedua universitas tersebut, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Bina Nusantara dan Universitas Tarumanegara juga membuka kursus untuk mahasiswa yang berminat mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin di luar jam kuliah.

(Kaboel dan Sulanti 2010: 214). Beberapa universitas di kota-kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya juga membuka program studi S-1 Sastra Tionghoa yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Tionghoa pada umumnya.

Sebagian besar peserta kursus bahasa Mandarin di lingkungan universitas adalah para siswa dari universitas yang bersangkutan, sebagian lagi pesertanya berasal dari luar kampus. Contohnya adalah di Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Lembaga ini mempunyai dua tempat kursus, satu di kampus lama yang terletak di Jalan Salemba, dan di kampus baru yang terletak di Depok. Bisa dikatakan sebagian besar peserta kursus di kampus Depok berasal dari lingkungan mahasiswa Universitas Indonesia, sedangkan peserta kursus di Jalan Salemba kebanyakan adalah dari masyarakat umum yang datang dari sejumlah wilayah di Jakarta. (Kaboel dan Sulanti 2010: 221).

Sekitar 25 persen dari peserta kursus bahasa Mandarin di Lembaga Bahasa Internasional berasal dari orang-orang Tionghoa, sedangkan yang 75 persen adalah non Tionghoa. Keadaan ini berbeda dengan di Universitas Bina Nusantara atau di Universitas Tarumanegara yang sebagian besar peserta kursusnya adalah dari kelompok orang-orang Tionghoa. (Kaboel dan Sulanti 2010: 222)

Sampai saat ini terbukti bahwa orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia masih berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak bangsa Indonesia.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan untuk anak-anak Tionghoa pada abad 19 banyak mengalami kesulitan. Meskipun demikian, orang-orang Tionghoa Peranakan yang tergabung dalam THHK dengan sekuat tenaga selalu memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak Tionghoa, karena pada awal abad 19 Pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak Tionghoa untuk mendapatkan pendidikan. Pada awal abad 20 sekolah THHK didirikan untuk memenuhi tuntutan orang-orang Tionghoa Peranakan untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Sekolah THHK berbahasa pengantar bahasa Tionghoa, dan sekolah ini sudah menggunakan metode modern yang telah diterapkan di Tiongkok dan Jepang.

Dengan bermunculannya sekolah-sekolah Tionghoa yang didirikan oleh masyarakat

Tionghoa, pemerintah Hindia Belanda takut semangat nasionalisme di kalangan orang-orang Tionghoa dan penerusnya akan semakin membesar. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda untuk menghambat semangat mereka. Sekolah Belanda ini bernama *Holandsch Chineesche School (HCS)*. Banyak orang tua murid yang memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Belanda, karena kurikulum di sekolah THHK tidak sesuai dengan keadaan di Hindia Belanda.

Pada saat penguasa militer Jepang menduduki Indonesia, semua sekolah asing (kecuali sekolah Tionghoa dan Indonesia) ditutup. Kekuasaan militer Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena setelah itu Belanda menduduki wilayah Indonesia kembali. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia, sekolah-sekolah Belanda oleh Pemerintah Indonesia ditutup. Sekolah-sekolah Tionghoa diberi subsidi dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Pergolakan politik yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1949 memberi dampak terhadap perkembangan pendidikan anak-anak Tionghoa di Indonesia. Sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia terbagi menjadi dua: yang pro-Taiwan dan pro-Beijing. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Bahkan Pemerintah Indonesia melarang anak-anak WNI asli masuk ke sekolah Tionghoa.

Pada masa pemerintahan orde baru seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Tiongkok dinyatakan ilegal. Akibatnya sekolah-sekolah Tionghoa ditutup secara besar-besaran oleh Pemerintah Indonesia. Banyak anak-anak Tionghoa yang melanjutkan sekolah mereka ke sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja katolik. Seluruh lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, karena sekolah-sekolah Indonesia hanya diprioritaskan untuk anak-anak WNI asli, maka banyak anak-anak keturunan Tionghoa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Maka, Pemerintah Indonesia memberikan ijin untuk membuka sekolah swasta yang disponsori oleh orang-orang Tionghoa. Sekolah ini di namakan Sekolah Nasional Proyek Khusus.

Setelah orde baru berakhir, pendidikan untuk anak-anak Tionghoa lebih bebas. Banyak SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang bagus, bahkan bisa dikatakan mahal dibuka untuk semua anak, baik dari WNI asli ataupun dari WNI keturunan asing. Sampai sekarang

orang-orang Tionghoa di Indonesia masih turut andil atau berperan penting dalam memajukan pendidikan, tidak hanya untuk anak-anak Tionghoa Peranakan saja tetapi juga

untuk anak-anak warga negara Indonesia. Banyak perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname. 2001. Buku Peringatan Seratus Tahun THHK/Pa Hua. Jakarta: Yayasan Pancaran Hidup
- Kaboel, Assa R. dan Nita Madona Sulanti. 2010. "Bahasa Mandarin di Mana-Mana: Studi Kasus di Wilayah DKI Jakarta". Setelah Air Mata Kering (Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998), Kompas 2010.
- Ong, Hok Ham. 2009. Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Pelly, Usman. 2003. "Murid Pri dan Nonpri pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru di Bidang Pendidikan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Multikultural". Jurnal Antropologi Indonesia (*Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*), No. 71, Mei-Agustus, Tahun XXVII.
- Prasetyo, Stanley Adi. 2010. "Adakah Media Untuk Keturunan Tionghoa?". Setelah Air Mata Kering (Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998), Kompas 2010.
- Suryadinata, Leo. 1988. Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
- Suryadinata, Leo. 1994. Politik Tionghoa Peranakan di Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. 2003. "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?". Jurnal Antropologi Indonesia (*Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*)